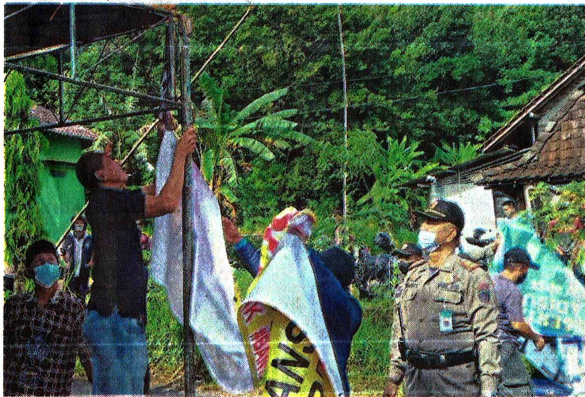




Penuhi Kesepakatan dengan Pemda DIY Blokade ke TPST Piyungan Dibuka Warga

YOGYA (KR) - Kemelut di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan berakhir, Kamis (12/5). Blokade yang dilakukan warga dalam wadah eBanyak Menolak, Banyak Melawan dibuka dibuka setelah ada kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah DIY.



Pembukaan blokade jalan menuju TPST Piyungan Bantul.

KR-Sukro Riyadi

Pembukaan blokade dilakukan Kepala Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan dan Kapanewon Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setda DIY Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Yudanegara, didampingi Lurah Sitimulyo Piyungan Juwani. Pengamanan dipimpin langsung Kapolsek Piyungan Kompol Rahmad Yulianto SH MSi.

Koordinator aksi 'Banyak Menolak, Banyak Melawan' Herwin Arfianto, mengungkapkan pembukaan akses karena sudah ada kesepakatan dengan pemerintah. Tuntutan warga sudah ada solusi tinggal pengawasan agar janji pemerintah tersebut tidak menguap begitu saja.

"Nanti kita akan kawal, kita juga ikutantau di lokasi bagaimana dan

seperti apa pekerjaannya apakah sudah seperti yang dijanjikan," ujar Herwin.

Menurut Herwin, jika tidak sesuai kesepakatan nantinya maka warga bakal komplain ke pemerintah. "Jika memberikan respons atau reaksi, ya nanti mungkin nggak sampai segitunya. Kalau nggak ada respons atas komplain, ya mungkin kayak gitu lagi (blokade)," ujarnya.

Dalam pertemuan sebelumnya bersama warga, Sekda DIY sudah sepakat untuk membuka blokade. Pemerintah sudah berjanji pada tahun 2025 itu TPST Piyungan stop aktivitas pembuangan sampah.

"Disini tidak ada transisi, tidak ada pelebaran, sudah stop pembuangan sampah. Tahun 2025 itu * **Bersambung hal 7 kol 5**

Blokade Sambungan hal 1

akan ada pengolahannya. Dari pemerintah akan membangun pengolahan dan akan beroperasi di tahun 2025 besok," ujarnya.

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bantul Suradal mengatakan, kesepakatan antara warga dan pemerintah terkait TPST Piyungan membawa konsekuensi yang mesti dilaksanakan. Artinya pemerintah daerah DIY harus menjalankan poin-poin seperti aspirasi warga sekitar TPST. "Oleh karena itu bersama-sama harus selalu dikawal dan dicermati agar masya-

rakat tidak terdampak dengan keberadaan TPST tersebut," tegasnya.

Politisi PKB tersebut mengatakan tidak kalah penting ialah pemerintah tidak boleh tergantung dengan TPST Piyungan. Mesti mencari alternatif lain, jangan sampai terjadi lagi warga berontak akibat penanganan belum optimal.

"Sudah saatnya sampah tidak sekedar dibuang. Tetapi harus dilakukan pengolahan rasanya menjadi opsi paling realistis ditempuh sekarang ini," ujarnya. **(Roy)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005